

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, desa merupakan salah satu bagian dari sistem pemerintahan yang paling dasar atau pemerintahan terendah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang Desa, “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonom asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. Peran pemerintah desa begitu sangat penting karena langsung berhadapan dengan masyarakat dalam berbagai hal, baik itu dalam proses pembangunan maupun dalam proses penerapan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut. Keberadaan desa di Negara Indonesia dari tahun-ketahun mengalami perubahan baik dari segi kekuasaan sampai dengan kepemimpinan seiring dengan perkembangan jaman.

Menurut Widjaja (2002 :21) “Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat desa”.

Menurut Abdullah (2011 : 168) “Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan (kaur) dan kepala dusun”. Masing-masing perangkat desa tersebut mempunyai tugas yang harus dikerjakan dalam hal pemerintahan desa. Sekretaris desa bertugas di bidang administrasi dan pelayanan umum. Misalnya kegiatan surat menyurat, kegiatan kearsipan, dan kegiatan membuat laporan, Kaur bertugas untuk membantu tugas sekretaris desa sedangkan Kepala dusun bertugas dibidang pembangunan desa.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa. Seorang kepala desa haruslah seorang warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam perda tentang tata cara pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa, calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai kepala desa terpilih dan menjadi pemimpin di desa tersebut dan juga sebagai penggerak perubahan desa yang dipimpin kearah yang lebih baik.

Dalam melaksanakan pemilihan umum disinilah masyarakat desa menentukan pemimpin yang dapat membangun desa kearah yang lebih baik dalam berbagai bidang, yakni dalam bidang pembangunan, pendidikan, agama, sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut. Pemilihan umum sangat sejalan dengan semangat demokrasi yang substansial yaitu demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, tanpa adanya rakyat maka pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai alat Negara untuk memerintah atau mengatur.

Menurut Davit Baetham dan Kevin Boyle (Mufti, 2012:97) mengatakan bahwa Demokrasi adalah “mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan”.

Dari pendapat diatas terdapat dua hal yang perlu dipahami yang pertama, demokrasi merupakan perwujudan keinginan secara keseluruhan anggota, dan semua anggota memiliki hak yang sama. Kedua, demokrasi merupakan indikator yang dapat mewujudkan prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politik yang melibatkan partisipasi rakyat dalam mewujudkan pengambilan/pembuatan keputusan secara kolektif.

Pemilu merupakan lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah perwakilan pemerintahan. Pemilu juga sering disebut sebagai pesta demokrasi yaitu untuk membentuk sistem kekuasaan Negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia. Pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pergantian pemimpin dengan sistem pemilihan memungkinkan terjadi persaingan yang cukup ketat antara calon-calon yang ingin menduduki kursi pemerintahan oleh karena itu para calon menyusun strategi yang bisa mengumpulkan suara terbanyak dari masyarakat setempat. Salah satu strategi

yang sering dilakukan oleh para calon yang ingin memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan yaitu dengan membayar suara rakyat atau sering disebut dengan politik uang. Hal ini dilakukan agar masyarakat mau berpartisipasi terhadap pemilihan pemerintahan desa yang akan berlangsung. Sementara cara yang dilakukan oleh para calon tersebut sudah bertentangan dengan partisipasi politik yang seharusnya dijalankan oleh setiap anggota masyarakat.

Menurut Herbert (Miriam, 2008 : 367) Partisipasi politik adalah “kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, yang secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum”.

Namun tidak semua masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa karena uang, akan tetapi karena kemungkinan lain yang akan dijumpai yakni karena adanya ikatan kekerabatan dengan calon Kepala Desa yang mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa. Demikian juga pada pemilihan Kepala Desa di Desa Si Empat Rube II, politik kekerabatan merupakan suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat pada pemilihan Kepala Desa. Kekerabatan merupakan adanya suatu hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hubungan kekerabatan bukan hanya berdasarkan garis keturunan, berdasarkan suku, marga, agama, ras tetapi kekerabatan juga bisa timbul karena persahabatan. Dalam pemilihan Kepala Desa pola kekerabatan yang sangat mempengaruhi menangnya salah satu kandidat yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa adalah berdasarkan agama, perkawinan dan marga. Hal ini yang menjadi masalah demokrasi yang muncul di Desa Si Empat Rube II Kecamatan Si

Empat Rube yang terjadi disetiap pemilihan Kepala Desa. Karena dengan berlakunya politik kekerabatan, pelayanan kepala desa kadang-kadang tidak merata artinya kepala desa sering megutamakan pelayanan kepada kerabat terdekatnya atau keluarganya.

Di lingkungan pedesaan aspirasi rakyat rakyat sangatlah penting, karena sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di lingkungan pedesaan. Demikian juga dengan keberhasilan pembangunan di desa menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional. Namun pada kenyataannya sekarang ini suara masyarakat desa hanya berguna ketika pemilihan umum tiba, baik itu pemilihan wakil rakyat ataupun pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan atau memajukan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangatlah penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa.

Desa si Empat Rube II merupakan salah satu desa di Kabupaten PakPak Bharat Provinsi Sumatera Utara. Di Desa Si Empat Rube II ini merupakan salah satu contoh proses pemilihan kepala desa yang berlangsung seru dalam ranah perpolitikan. Hal ini dapat dilihat pada saat sebelum pemilihan kepala desa berlangsung, para Calon Kepala Desa Si Empat Rube II sangat berkompetensi untuk mencari dukungan masyarakat sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara menjanjikan hal-hal yang bisa membuat masyarakat tertarik dengan kepemimpinan Calon Kepala Desa tersebut. Selain itu calon kepala desa juga

mendekati tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Si Empat Rube II. Dalam pemilihan Kepala Desa Si Empat Rube II tidak terlepas dari keinginan untuk memperoleh kekuasaan.

Menurut (Budiardjo, 2008:60) kekuasaan adalah "kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga prilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari seseorang yang mempunyai kemampuan". Seseorang atau sekelompok orang dapat memiliki kekuasaan jika memiliki sumber daya kekuasaan. Sumber daya kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, kepandaian atau keterampilan dan kepercayaan atau agama.

Dari pendapat tersebut maka calon Kepala Desa Si Empat Rube II harus mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat Si Empat Rube II agar mendukung kandidat yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Si Empat Rube II. Dalam pemilihan Kepala Desa Si Empat Rube II politik yang sering di jumpai yaitu politik kekerabatan atau politik dinasti. Politik dinasti merupakan sebuah strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada dipihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan.

Kekuasaan di atas juga sama dengan kekuasaan tradisional dalam bentuk patriarkalisme. Menurut Weber (Mufti, 2013:56) kekuasaan tradisional dalam bentuk patriarkalisme adalah kekuasaan yang berada di tangan satuan kekerabatan (rumah tangga) yang dipegang oleh seorang individu tertentu yang memiliki otoritas warisan.

Di Desa Si Empat Rube II, dalam mempertahankan kekuasaan politik kekerabatan merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh kandidat yang akan menjadi calon Kepala Desa. Contohnya jika calon Kepala Desa Marga Padang maka yang mendukung calon tersebut sebagian besar adalah marga Padang dan seluruh kerabat yang masih ada hubungan darah dengan calon Kepala Desa tersebut. Dan setelah calon tersebut terpilih menjadi Kepala desa maka yang menjadi perangkat-perangkat desa atau anggota BPD yang dipilih adalah keluarga atau kerabat terdekat saja. Inilah yang menjadi masalah kekuasaan yang terjadi di desa Si Empat Rube II. Karena jika hal ini terus berlangsung dari generasi ke generasi maka kemajuan desa jambu Mbellang bisa terhalangi karena yang diutamakan adalah keluarga yang memiliki ikatan kekerabatan dengan Kepala Desa tersebut bukan masyarakat luas.

Masalah politik kekerabatan dalam pemilu pemerintahan desa merupakan salah satu masalah yang harus diatasi yakni memberi sosialisasi kepada masyarakat bahwa dalam pemilihan pemimpin khususnya di desa masyarakat seharusnya tidak memilih berdasarkan hubungan keluarga atau karena faktor-faktor tertentu, akan tetapi masyarakat harus mengetahui apa yang menjadi Visi dan Misi seorang Calon Kepala Desa. Karena dengan hal tersebut kemajuan desa akan semakin bagus jika pemerintah memiliki visi dan misi untuk memajukan desa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti "Politik Kekerabatan dalam Pemilu Pada Pemerintahan Desa di Desa Si Empat Rube II Kecamatan Si Empat Rube Kabupaten PakPak Bharat".

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Politik Kekerabatan dalam pemilu pada pemerintahan desa
2. Eksistensi kekerabatan dalam mempertahankan kekuasaan pemerintahan desa
3. Faktor yang membantu terjadinya sistem politik kekerabatan

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan terarah, maka penulis hanya membatasi masalah pada "Politik kekerabatan dalam pemilu pada Pemerintahan Desa".

## **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Politik Kekerabatan dalam Pemilu pada Pemerintahan Desa di desa Si Empat Rube II Kecamatan Si Empat Rube Kabupaten PakPak Bharat"?

## **E. Tujuan Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian, hal yang sangat penting adalah menetapkan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

"Untuk mengetahui Politik Kekerabatan dalam Pemilu Pada Pemerintahan Desa di Desa Si Empat Rube II Kecamatan Si Empat Rube Kabupaten PakPak Bharat".



## F. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian telah tercapai, maka harus dapat dipastikan bahwa hasil penelitian tersebut bermanfaat bagi penulis dan orang lain yang membacanya.

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan atau pengetahuan dalam melakukan penelitian tentang politik kekerabatan dalam pemilu pemerintahan desa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap lembaga pendidikan khususnya mengenai politik kekerabatan.
3. Bagi pemerintahan Desa Si Empat Rube II Kecamatan Si Empat Rube Kabupaten PakPak Bharat dapat menambah wawasan dan menjadi bahan masukan dalam mempertahankan kekuasaan.